

Pekerja Anak, Kemiskinan, dan Nilai Ekonomi Anak, Studi Kasus Provinsi Lampung Tahun 2011

Rizqa Fithriani

Anak-anak sebagai individu yang tidak bebas merupakan korban terparah dari kemiskinan. Anak-anak yang terjebak dalam kemiskinan memiliki kesempatan yang terbatas untuk mengubah nasibnya. Mereka terjebak dalam rutinitas yang merenggut hak mereka untuk bermain, hak mengembangkan diri secara wajar, serta hak akan pendidikan.

Anak yang hidup dalam kemiskinan tidak memiliki kesempatan yang sama dengan anak lainnya akan pendidikan. Mereka tidak mampu atau bahkan tidak dimungkinkan untuk dapat memenuhi kebutuhan akan pendidikan. Karena umumnya mereka menanggung kewajiban untuk mencari nafkah atau membantu orang tua mereka dalam mencari nafkah. Pada kondisi juli 2012 setidaknya terdapat 12.109.967 pekerja anak berusia lima hingga 15 tahun yang berasal dari keluarga dengan status ekonomi 30 persen terendah di Indonesia (Basis data terpadu TNP2K).

Provinsi Lampung memiliki tenaga kerja anak terbesar kedua di Sumatera setelah provinsi Sumatera Utara. Pada juli 2012 terdapat 63,49 persen anak-anak yang berasal dari keluarga dengan status ekonomi 30 persen terbawah menjadi pekerja anak (Basis data terpadu TNP2K).

Tingginya angka pekerja anak pada keluarga dengan status ekonomi terendah menjadi perhatian sendiri bagi pemerintah. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk menekan jumlah pekerja anak yang tinggi ini, salah satunya yakni dengan pendidikan. Pemberian bantuan pendidikan berupa BOS dan Beasiswa Siswa Miskin telah dilakukan untuk menekan jumlah tenaga kerja anak.

Namun nyatanya pemberian insentif pendidikan berupa penekanan biaya pendidikan belum efektif dalam menekan jumlah tenaga kerja anak. Pasalnya biaya pendidikan yang mahal bukanlah satu-satunya alasan merebaknya pekerja anak di Negara kita. Masih tingginya nilai ekonomi anak, yakni biaya peluang (*opportunity cost*) dari waktu yang dihabiskan anak di sekolah dari pada mencari nafkah, bagi keluarga menyebabkan pengurangan jumlah tenaga kerja anak menjadi perkara yang tidak mudah.

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengukur sejauh mana pengaruh nilai ekonomi anak terhadap maraknya tenaga kerja anak. Selain itu dalam tulisan ini juga ditujukan untuk melihat apakah gender turut andil dalam tenaga kerja anak.

Dalam ikhtisar kebijakan singkat “Pekerja Anak dan Pendidikan di Masyarakat Papua” (ILO, 2011) dipaparkan bahwa tingginya nilai ekonomi anak dalam keluarga miskin menjadikannya hambatan bagi anak-anak di Papua untuk mengenyam pendidikan. Dan hal tersebut mendorong orang tua untuk mempekerjakan anak mereka dari pada menyekolahkan mereka.



Rocky R.J. Akarro dan Nathan Anthon Mtweve dalam “*Poverty and Its Association with Child Labor in Njombe District in Tanzania: The Case of Igima Ward*” menunjukkan bahwa tenaga kerja anak merupakan refleksi atas kemiskinan. Status miskin rumah tangga merupakan factor pendorong bagi anak-anak untuk berkecimpung dalam kegiatan ekonomi.

Untuk mempermudah analisis dalam tulisan ini digunakan model regresi logistik yang menggambarkan bagaimana nilai ekonomi anak dan gender berperan dalam pembentukan tenaga kerja anak. Nilai ekonomi anak diukur dari peluang anak-anak dengan pengeluaran perkapita dibawah garis kemiskinan untuk menjadi pekerja anak. Pekerja anak yang disoroti dalam tulisan ini berupa anak-anak berusia anatar sepuluh tahun hingga 17 tahun yang bekerja. Data yang digunakan dalam studi ini merupakan olahan dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2011 di Provinsi Lampung.

Dari studi kasus sampel tenaga kerja anak pada SUSENAS 2011 di Provinsi Lampung setidaknya terdapat 62,32 persen dari tenaga kerja anak tersebut yang tidak lagi menempuh pendidikan di sekolah. Sebagian besar pekerja anak tersebut, 59,05 persennya, membantu menopang perekonomian keluarga sebagai tenaga kerja keluarga atau tenaga kerja yang tak dibayar. Dan umumnya pekerja anak tersebut bekerja pada lapangan usaha pertanian, yakni sebesar 58,08 persen.

Dari permodelan regresi logistik diperoleh hasil bahwa peluang anak usia sepuluh hingga 17 tahun untuk menjadi pekerja anak pada keluarga miskin adalah sebesar 0,802 kali lebih tinggi dari pada mereka yang berasal dari keluarga tidak miskin. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya nilai ekonomi anak tidak terpaku pada tingkat ekonomi keluarganya. Pada keluarga yang tidak miskin pun nilai ekonomi anak masih tinggi. Anggapan lebih berharga nya anak untuk bekerja dibandingkan sekolah nyatanya telah menjamur pada masyarakat kita. Dan tentu saja masalah ini dapat menghambat penurunan tenaga kerja anak melalui kegiatan pengembalian anak ke sekolah.

Nyatanya jenis kelamin seorang anak sangat mempengaruhi peluangnya untuk menjadi pekerja anak. Pada anak laki-laki peluang nya untuk menjadi pekerja anak adalah 3,26 kali lebih besar dari pada anak wanita,. Beban ekonomi yang ditanggung oleh anak laki-laki lebih tinggi dari pada anak perempuan. Tunutan untuk membantu keluarga dalam menopang perekonomian keluarga nampaknya begitu besar bagi anak laki-laki.

Masih tingginya nilai ekonomi anak pada masyarakat kita dapat menjadi penghalang bagi kegiatan penurunan jumlah tenaga kerja anak. Pemberian subsidi pendidikan untuk menekan biaya pendidikan tidak akan efektif dalam menekan jumlah pekerja anak selama paradigma lebih baik anak bekerja dari pada sekolah masih tertanam dalam benak masyarakat kita. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan berupa pemberian pemahaman kepada masyarakat kita akan *trade off* antara mengirim anak mereka kesekolah dan mempekerjakan anak mereka. Tidak hanya itu pemberdayaan ekonomi keluarga miskin juga harus dilakukan agar mampu menekan nilai ekonomi anak pada keluarga tersebut.

Key words: kemiskinan, tenaga kerja anak, nilai ekonomi anak, pendidikan, lampung, SUSENAS.

